

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
TIDAK MEMILIKI KEAHLIAN DAN KEWENANGAN MELAKUKAN
PRAKTIK KEFARMASIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 543/PID.SUS/2022/PN PDG DAN PUTUSAN NOMOR
280/PID.SUS/2022/PN PMN)**

TESIS



PEMBIMBING:

- 1. Dr. Fadillah Sabri, S.H., M.H.**
- 2. Dr. Siska Elvandari, S.H., M.H**

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG**

2023

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
TIDAK MEMILIKI KEAHLIAN DAN KEWENANGAN MELAKUKAN
PRAKTIK KEFARMASIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 543/PID.SUS/2022/PN PDG DAN
PUTUSAN NOMOR 280/PID.SUS/2022/PN PMN)**

Nining, 2120112029, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Andalas, Tahun 2023

ABSTRAK

Salah satu penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan pelayanan pengamanan, sediaan farmasi dan alat kesehatan. Obat termasuk ke dalam kategori sediaan farmasi harus dikelola oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, sarana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan artinya sarana tersebut tidak memiliki tenaga kefarmasian dalam melaksanakan dan menerapkan standar profesi dibuktikan dengan memiliki surat izin praktik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pada praktiknya masih ditemukan tindak pidana melaksanakan praktik kefarmasian tidak memiliki keahlian dan kewenangan, sehingga perbuatan tersebut telah diminta pertanggungjawaban pidananya dan telah mendapat putusan pengadilan dengan putusan pidana yang ringan yaitu Putusan Nomor 543/Pid.sus/2022/PN Pdg dan Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Pmn. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian pada kasus Putusan Nomor 543/Pid.sus/2022/PN Pdg dan kasus Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Pmn? 2) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian pada kasus Putusan Nomor 543/Pid.sus/2022/PN Pdg dan Kasus Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Pmn? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penyusunan data dengan sistematis, pengkajian, selanjutnya menyimpulkan pada keterkaitan terhadap permasalahan yang diteliti dengan pendekatan undang-undang. Penerapan sanksi pidana telah memenuhi unsur-unsur pidana pada Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan dijatuhi pidana denda yang ringan, sehingga hal ini belum mencerminkan rasa keadilan. Pidana denda harus dapat dirasakan sebagai penderitaan bagi pelaku tindak pidana sehingga menimbulkan efek jera, dan tidak mengulangi kembali perbuatan pidana dan masyarakat lain tidak berbuat perbuatan serupa. Dasar pertimbangan hakim berasal dari yuridis dan non yuridis (terdakwa mengakui dan berlaku sopan di persidangan dan berjanji tidak mengulangi lagi).

Kata Kunci : Sanksi Pidana; Tindak Pidana; Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan; Praktik Kefarmasian

IMPLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST CRIMINAL ACTORS WHO DO NOT HAVE THE EXPERTISE AND AUTHORITY TO CONDUCT PHARMACEUTICAL PRACTICES BASED ON LAW NUMBER 36 OF 2009 CONCERNING HEALTH (CASE STUDY OF DECISION NUMBER 543/PID.SUS/2022/PN PDG AND DECISION NUMBER 280/PID.SUS/2022/PN PMN)

Nining, 2120112029, Master of Law Pascasarjana Faculty of Law Andalas University

ABSTRACT

One of the implementation of health efforts as referred to in Article 48 of Law Number 36 of 2009 concerning Health is carried out through security service activities, pharmaceutical preparations and medical devices. Medicines included in the category of pharmaceutical preparations must be managed by health workers who have the expertise and authority to practice pharmacy. Based on Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 51 of 2009 concerning Pharmaceutical Work, facilities that do not have expertise and authority mean that these facilities do not have pharmaceutical staff to carry out and apply professional standards as evidenced by having a license to practice in accordance with applicable laws and regulations. However, in practice it is still found that the crime of carrying out pharmaceutical work does not have the expertise and authority, so that the act has been held criminally responsible and has received a court decision with a light criminal verdict, namely Decision Number 543/Pid.sus/2022/PN Pdg and Decision Number 280 /Pid.Sus/2022/PN Pmn. The formulation of the problem in this research is: 1) How is the application of criminal sanctions against perpetrators of criminal acts who do not have the expertise and authority to practice pharmacy in the case of Decision Number 543/Pid.sus/2022/PN Pdg and the case of Decision Number 280/Pid.Sus/ 2022/PN Pmn? 2) What is the basis for the judge's consideration of the perpetrators of criminal acts not having the expertise and authority to practice pharmacy in the case of Decision Number 543/Pid.sus/2022/PN Pdg and Case Decision Number 280/Pid.Sus/2022/PN Pmn? This study uses normative juridical legal research methods, namely the systematic compilation of data, assessment, then concludes on the relationship to the problems studied with the statutory approach. The application of criminal sanctions has fulfilled the criminal elements in Article 198 of Law Number 36 of 2009 concerning Health and was sentenced to a light fine, so this is contrary to justice. Fines must be felt as suffering for the perpetrators of criminal acts so as to create a deterrent effect, do not repeat criminal acts and the community does not commit similar acts. The basis for the judge's considerations comes from juridical and non-juridical (the defendant admits and behaves politely in court and promises not to repeat it.

Keywords : *Criminal Sanctions; Criminal Acts; Lack of Expertise and Authority; Pharmaceutical Practice*